

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Boedi, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Amanat Anisitus, 2001, *Membag Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal A, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Anwar Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Banjarnahor Alexander Halomon, 2014, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Nasabah Dalam perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Menggunakan Klausula Baku Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Semarang*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Brata Adya Atep, 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Goesniadhie Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, JPBooks, Surabaya
- Harsono Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hartanto J. Andy, 2010, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Hitaprana, 2015, *Bahan Ajar Tehnik Pembuatan Akta I*, Universitas Gajahmada Yogyakarta.
- Hutasoit Ani Rostina Fransisca, 2012, *Kepastian Hukum Dari Sertifikat Yang Diterbitkan Akibat Kelalaian Di Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sehingga Mengakibatkan Sertifikat Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.

- Kie Thong Tan, 2013, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, hlm.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta.
- Miyasto, 1993, *Seri KeadilanFiskal dan Moneter Nomor 10. Filosofi PBB dalam Konteks Keadilan dan Pembiayaan Pembangunan, Pengkajian perpajakan dan keuangan*, PT. Binarena Pariwara, Jakarta.
- Mulyadi, 2005, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mustofa, 2014, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi Karya Media.
- Nasution. S, 2006, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho Sapto Setio, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Perundang-Undangan*, Jakarta
- Numantu Safri, 2005, *Pengaturan Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Parangin Effendi, 2014, *Hukum Waris*, Raja Grafindo, Jakarta
- Prakosa Bambang Kesit, 2005, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Sovirin Malian, Yogyakarta
- Satrio J, 1993, *Hukum Harta dan Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan P Mariot, 2005, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak K Lubis Suhardi , 2007, *Komina Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro Rochmat, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan*, PT. Eresco Bandung
- Sudarsono, 1992, *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Usman Suparman, 1997, *Fiqh Mawaris*, Gala Media Pratama, Jakarta.
- Waluyo, 2006, *Perpajakan di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 102

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8.

Kamus

Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Balai Pustaka, Jakarta.

## D. Internet

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

<https://www.slideshare.net/mobile/hindarlintang/hukum-warisbw>

<https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum>

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pQ35b60aZw4J:jdih.riste>

<kdikti.go.id/%3Fq%3Dsystem/files/dokumentasi=12.11/10-04-2017>

<https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum/>